

MODEL PENATAAN KERAGAMAN ETNIK DI DAERAH TRANSMIGRASI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

Roni Lukum¹, Rauf.Hatu², Sastro.M.Wantu³, Ismet Sulila⁴, Yanti Aneta⁵

Universitas Negeri Gorontalo¹²³⁴⁵

Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo

Email Korespondensi: ronilukum23@gmail.com

Abstrak: Penataan keragaman etnik menjadi perhatian serius bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang memiliki kondisi demografi yang heterogen diperlukan model yang pasti dalam menata kebhinekaan. Berkat keluhuran hati The Founding Fathers memilih dasar negara Pancasila dan memformulasikan dalam kebijakan makro melalui konstitusi UUD 1945 nilai-nilai dasar negara sebagai model tradisi multikulturalisme mampu menata keragaman demografi yang ada di negara kita. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban langsung dari mengungkap bentuk-bentuk penataan keragaman etnik di daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, mengungkap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penataan keragaman etnik, untuk melihat implikasi penataan etnik di daerah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Pengungkapan tujuan penelitian ini digunakan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa (1). Penataan keragaman etnik di Kabupaten lewat Forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) sebagai pelaksanaan kebijakan makro pemerintah pusat masih dalam kondisi sangat tangguh dalam mewujudkan integrasi nasional, (2) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penataan keragaman etnik di daerah transmigrasi kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, disebabkan oleh kearifan lokal dan peran institusi pendidikan formal (3). Dampak penataan keragaman etnik di daerah memberikan kontribusi bagi rasa nyaman warga transmigrasi mengembangkan usaha secara bersama tanpa ada gesekan sosial. Semoga kondisi ini dapat dipertahankan demi menjaga integrasi nasional.

Kata kunci; Model Penataan, Keragaman Etnik, Transmigrasi

Abstract: Structuring ethnic diversity is a serious concern for the nation and state of the Republic of Indonesia, which has a heterogeneous demographic condition, a definite model is needed in managing diversity. Thanks to the nobility of the Founding Fathers who chose the Pancasila state foundation and formulated it in macro policies through the 1945 Constitution, the basic values of the state as a model of multiculturalism tradition are able to organize the demographic diversity that exists in our country. The purpose of this research is to find direct answers to the forms of ethnic diversity arrangement in Boalemo Regency, Gorontalo Province, to reveal the factors that support the success of ethnic diversity arrangement, to see the implications of ethnic arrangement in Boalemo Regency, Gorontalo Province. The purpose of this research is to use qualitative research methods. The results of the research findings can be concluded that (1). The arrangement of ethnic diversity in the district through the Inter-religious Communication Forum (FKUB) as the implementation of the central government's macro policy is still in a very strong condition in realizing national integration, (2) factors that support the success of ethnic diversity arrangement in the transmigration area of Boalemo district Gorontalo Province, caused by local wisdom and the role of formal education institutions (3). The impact of ethnic diversity arrangement in the region contributes to the comfort of transmigration residents to develop business together without any social friction. Hopefully this condition can be maintained in order to maintain national integration.

Keywords: Structuring Model, Ethnic Diversity, Transmigration

Article History :

Article History : Received 06-01-2025; Revised 26-01-2025; Accepted 28-02-2025

PENDAHULUAN

Penataan keragaman etnik menjadi perhatian serius bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang memiliki kondisi demografi yang heterogen diperlukan model yang pasti dalam menata kebhinekaan (Wahid et al., 2019). Berkat keluhuran hati The Founding Fathers memilih dasar negara Pancasila dan memformulasikan dalam kebijakan makro melalui konstitusi UUD 1945 nilai-nilai dasar negara sebagai model tradisi multikulturalisme mampu menata keragaman demografi yang ada di negara kita. Dengan kata lain multikulturalisme menerima dan menghargai keberagaman budaya (kebhinekaan) (Mahfud 2006). Sedangkan menurut Suryadinata (2002) multikulturalisme, bukanlah sebuah doktrin politik pragmatis, tetapi multikulturalisme merupakan cara pandang manusia dalam kehidupan. Untuk melakukan makna kebhinekaan perlu adanya penataan etnis melalui program pelebagaan tradisi multikulturalisme pada lokasi transmigrasi di kabupaten Boalemo menunjukan hasil yang sangat positif, dimana dengan adanya sosialisasi yang intens atas kebijakan makro oleh Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB) membuat kabupaten Boalemo sebagai lokasi tujuan penempatan transmigrasi sejak tahun 1980 hingga saat ini tidak pernah mengalami konflik sosial.

Pendapat lain tentang multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa perbedaan budaya yang berbeda dapat eksis dilingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain. Dengan kata lain multikulturalisme menerima dan menghargai keberagaman budaya (Nugraha, 2020). Sedangkan menurut Suryadinata (multikulturalisme, bukanlah sebuah doktrin politik pragmatis, tetapi multikulturalisme merupakan cara pandang manusia dalam kehidupan. Dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang memiliki keragaman suku dan budaya, maka pemahaman akan multikulturalisme ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting. Multikultural di Indonesia sering disebut dengan makna Kebhinekaan. (Fadli et al., 2022). Pandangan Fleras mengemukakan tipologi multikulturalisme yang memberikan ruang pada publik untuk mengidentifikasi level perbedaan makna yang terkait dengan wacana tersebut. Ia mengidentifikasi level pemaknaan terhadap multikulturalisme a. multikulturalisme sebagai fakta empiris (*empirical reality*) yang menggambarkan keberagaman dunia sebagai tempat tinggal. b. Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi atau filosofi yang meyakini kewajiban untuk menghormati perbedaan budaya (*cultural differences*) dan menawarkan kesetaraan sosial (*social equality*). c. multikulturalisme sebagai kebijakan (*policy*) dan program resmi yang membentuk mozaik identitas dan etnisitas. d. multikulturalisme sebagai praksis yang mencerminkan konvergensi antara kebijakan dan filosofi dalam level masyarakat. e. multikulturalisme sebagai penahan hegemoni (*counterhegemony*) yang menantang tatanan konstitusional yang *rasialis eurosentris*. (Ubadah, 2022). Bila mengikuti Bikhu Parekh (2001) istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen, yakni, pertama, konsep ini terkait dengan kebudayaan; kedua, konsep ini merujuk kepada pluralitas kebudayaan; dan ketiga, konsep ini mengandung cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Oleh sebab itu multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang atau semacam ideologi dalam kehidupan manusia (Achmad Fedyani Syaifuddin, 2015).

Penataan etnis melalui program pelebagaan tradisi multikulturalisme pada lokasi transmigrasi di kabupaten Boalemo menunjukan hasil yang sangat positif, dimana dengan adanya sosialisasi yang intens atas kebijakan makro oleh Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB) membuat kabupaten Boalemo sebagai lokasi tujuan penempatan transmigrasi sejak tahun 1980 hingga saat ini tidak pernah mengalami konflik sosial antara warga transmigrasi dengan warga etnis lokal Gorontalo. Hal ini dibuktikan hasil wawancara dengan salah satu informan kunci yang terlibat dalam melembagakan penataan tradisi multikulturalisme memberikan fakta sosial bahwa Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam melembagakan tradisi multikulturalisme melalui Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB) memberikan dampak positif pada kondisi hubungan antar etnis lokal Gorontalo dengan kelompok etnis transmigrasi masih sangat tangguh.

Penataan dalam konteks manajemen atau tata kelola merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan sumber daya atau elemen-elemen dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu (Batty & Reilly, 2023). Model ini mengacu pada cara mengatur dan mengelompokkan fungsi, departemen dan individu dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Krasnyakov, 2022). *Preferensi sistimatis*. Metode ini mencakup pemberian preferensi kepada kelompok etnis sendiri dalam rekrutmen untuk posisi penting pada birokrasi pemerintahan baik sipil dan militer, dan dalam alokasi sumber dan pelayanan oleh instrumen AP. Untuk menghindari protes dari kelompok etnis yang merasa dirugikan oleh tindakan diskriminatif tersebut.

Mekanisme pasar dan Merit individual. Proses atau mekanisme ini biasanya digunakan bila kelompok elite yang berkuasa yakin bahwa kelompok etnis mereka sudah berkemampuan tinggi dan karenanya dapat berkompetisi secara terbuka.

Power sharing atau upaya sejenisnya untuk menciptakan keseimbangan partisipasi dan pemerataan antar etnis tercipta bila semua masyarakat etnis dijamin atau mendapatkan *share* secara adil.

Dewasa ini sikap saling mengerti dan memahami kehidupan dalam keragaman semakin terkikis dalam menyikapi keragaman maupun etnis (Collier, 2001). Kondisi masyarakat yang plural terdiri dari aspek suku, ras dan agama serta status sosial memberikan kontribusi terhadap perkembangan dinamika dalam masyarakat (Kolo, 2015). Keragaman etnik dikategorikan sebagai masyarakat majemuk, masyarakat yang terdiri dari berbagai etnik yang berbeda dalam suatu sistem pemerintahan dan paksaan (Cservenka et al., 2017). Keragaman etnik

mengacu pada keadaan yang memperlihatkan wujud pembagian kekuasaan di antara kelompok masyarakat yang tergabung atau disatukan, menyatu dalam rasa kesetiaan (Ahmed, 2019). Masyarakat majemuk membutuhkan pengertian dan kearifan yang tinggi pada setiap masyarakatnya untuk bijak bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda etnis. Selain itu, keragaman etnik memiliki dampak yang signifikan terhadap pentan ketahanan wilayah (Armeaud et al., 2022). Bila melihat konsep keberagaman di atas, mestinya keragaman akan memperkuat ketahanan wilayah mencakup kemampuan suatu wilayah untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan, baik dari segi keamanan, sosial, ekonomi dan lingkungan (Ferguson, 2020). Penataan yang mempertimbangkan keragaman etnik memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan semua kelompok terakomodasi (Inder et al., 2012). Perencanaan yang inklusif dapat mencegah marginalisasi kelompok tertentu dan mengurangi potensi konflik sosial yang mengganggu ketahanan wilayah (Hearle, 2022). Mengakui dan merayakan keragaman etnik dapat memperkuat identitas lokal dan rasa kebanggaan wilayah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan membangun wilayah. Masyarakat yang memiliki komitmen yang kuat lebih cenderung berkontribusi pada ketahanan dan kesejahteraan wilayah (Shukla, 2020). Penataan ketahanan harus mencakup mekanisme resolusi konflik yang adil dan efektif, mengatasi perbedaan etnik dengan cara yang konstruktif (Santoso et al., 2023). Dengan demikian, mempertimbangkan keragaman etnik dalam penataan wilayah tidak hanya penting untuk kesejahteraan saja, tetapi untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas wilayah di masa depan.

Dalam pembangunan nasional, pemerataan penduduk menjadi aspek yang sering ditemukan dalam kebijakan-kebijakan skala nasional. Dalam pemerataan, transmigrasi merupakan inisiatif pemerintah kolonial Belanda yang akhirnya dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan orang yang tidak memiliki tanah dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang sedikit penduduk (Murtisari et al., 2022). Konsep pemindahan ini pada dasarnya merupakan upaya negara untuk tujuan pengembangan daerah. Pemindahan terjadi secara permanen untuk mengurangi kemiskinan dan kelebihan penduduk yang membludak (Pratiwi et al., 2022; Warganegara & Waley, 2022).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo pada kelompok etnis lokal Gorontalo dengan kelompok etnis transmigrasi. Alasan penetapan lokasi penelitian disebabkan kabupaten Boalemo sebagai tujuan penempatan transmigrasi dari tahun 1980 mengalami perubahan sosial yang dapat berpotensi terjadinya gesekan sosial sebagai akibat dari penguasaan sumber daya ekonomi sehingga etnis lokal Gorontalo masih tetap dapat menerima kehadiran kelompok etnis transmigrasi, dengan adanya hubungan harmonis peneliti tertarik untuk menguji beberapa teori sosial dan juga menguji kemampuan pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam menata kehidupan antar etnis di kabupaten Boalemo. Untuk membuktikan dan menguji beberapa teori sosial terhadap pemetaan konflik sosial diperlukan pendekatan penelitian kualitatif dalam mengungkap mengapa penempatan transmigrasi di wilayah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo masih tetap sangat tangguh dalam menjaga keharmonisan antar kelompok etnis transmigrasi dengan kelompok etnis lokal. Dalam menggali informasi fokus penelitian ini menggunakan sumber Informan yang mengetahui kondisi masyarakat dilokasi transmigrasi berdasarkan perwakilan dari beberapa etnis yang ada dilokasi penelitian. Begitu juga dengan informan kunci dari pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Seperti Bupati, Sekda, kepala Kesbangpol kabupaten Boalemo, camat, kepala desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Untuk pengumpulan data bagi penataan etnis dilokasi transmigrasi dilakukan melalui observasi terhadap kondisi transmigrasi di wilayah kabupaten Boalemo, wawancara dengan *key person* dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Model analisis interaktif dibagi dalam 3 (tiga) tahapan berikut: *tahap pertama data reduction* (pengurangan data), merupakan proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan, menyeleksi dan penyederhaan data yang diperoleh dilapangan. *Tahap kedua Data Display* (penyajian data) merupakan sekumpulan hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. *Tahap ketiga Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan) yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bila melihat penataan kebijakan etnis di kabupaten Boalemo yang dilaksanakan melalui kebijakan makro dengan melaksanakan kebijakan makro dalam membangun tradisi multikulturalisme. Hasil penataan tersebut dilaksanakan dalam wujud sosialisasi tradisi multikulturalisme melalui Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB). Berdasarkan penelusuran dilapangan diawali dari pernyataan Pelaksana tugas Kesbangpol kabupaten Boalemo Plt ibu Dorci R Paweni, S.Sos ketika ditemui di Kantor Kesbangpol memberikan

pernyataan terkait dengan kondisi keharmonisan di Kabupaten Boalemo sebagai daerah tujuan penempatan transmigrasi sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan pelebagaan tradisi multikulturalisme pemerintah daerah kabupaten Boalemo memiliki pengaruh positif pada penempatan transmigrasi di wilayah Kabupaten Boalemo terdiri dari etnis Jawa, Bali, Minahasa, terkait dengan keberadaan transmigrasi tidak memiliki gesekan perbedaan suku, perbedaan ras. Mengapa demikian karena ada intervensi kebijakan dari pemerintah daerah dan bekerjasama dengan Forkompinda (Kejaksaan, Pengadilan Negeri, TNI dan POLRI) secara bersama mensosialisasikan tradisi multikulturalisme melalui wadah organisasi FKUB (Forum komunikasi antar umat beragama) yang begitu baik kerja sama dengan pemerintah daerah. Kebijakan yang dilakukan ini selalu ada kegiatan di daerah dengan tidak membedakan suku, ras, dan agama. (4 Januari 2024)”.

Untuk lebih mendapatkan tindak lanjut dari informasi dari kondisi tradisi multikulturalisme di Kabupaten Boalemo, peneliti menemui sekretaris Camat Kecamatan Paguyaman bapak Joni Waro memberikan jawaban kondisi transmigrasi di Kabupaten Boalemo di bawah ini.

“Hasil evaluasi terhadap kebijakan pelebagaan tradisi multikulturalisme pemerintah daerah kabupaten Boalemo berdasarkan penilaian saya untuk kondisi kecamatan Paguyaman penempatan transmigrasi ada di desa Bualo, desa Bongo 4, Desa Huongo. Untuk desa Bualo ditempati oleh etnis Jawa dan Gorontalo, untuk desa Bongo 4 penempatan warga transmigrasi ditempati dari etnis Bali, etnis Jawa dan etnis Gorontalo. Diperkirakan warga Transmigrasi masuk ke kecamatan Paguyaman sekitar tahun 1980an dan jumlah warga transmigrasi telah bertambah dengan adanya angka kelahiran di wilayah kecamatan Paguyaman. Dan bila melihat tingkat keberhasilan warga transmigrasi dapat dilihat dari beberapa usaha pertanian dan usaha perdagangan yang telah dilakukan hingga warga transmigrasi di wilayah kecamatan Paguyaman berkembang pesat kemajuan kesejahteraannya dan hingga saat ini keharmonisan antara kelompok etnis lokal dan kelompok etnis transmigrasi masih sangat tangguh (wawancara tanggal 4 Januari 2024).

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penataan Etnis.

Kabupaten Boalemo kebijakan ketahanan nasional berupa kebijakan mikro tidak diformulasikan dalam bentuk RANPERDA tradisi multikulturalisme sekalipun di daerah tempat tujuan transmigrasi memiliki potensi konflik dimasa depan. Namun pemerintah daerah Kabupaten Boalemo masih dapat merawat kebhinekaan melalui sosialisasi tradisi multikulturalisme melalui sosialisasi tradisi multikulturalisme lewat Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB). Untuk menemukan jawaban tersebut, ada beberapa indikasi faktor pendukung terciptanya hubungan yang harmonis di wilayah kabupaten Boalemo di bawah ini.

Kearifan Lokal

Faktor-faktor pendukung dalam membangun hubungan harmonis antar etnis Bali, Minahasa dengan etnis lokal Gorontalo, etnis Jawa, ras arab, ras Eropa dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Pernyataan dari informan penelitian dari etnis lokal ibu Onis Panigoro, Nikadek Sumiati etnis Bali dan Ranti Marjun mereka sepakat daya dukung kearifan lokal sebagai alat pemersatu bagi warga masyarakat sebagaimana pendapat mereka di bawah ini.

“Selama ini di Desa Tri Rukun walaupun masyarakatnya berbeda agama, kebudayaan dan ritual masyarakat, itu bukanlah menjadi penghambat hubungan antar etnis lokal, etnis Bali dan etnis Minahasa. Interaksi masyarakat di Desa Tri Rukun sangat harmonis, karena yang merekatkan hubungan antar etnis adalah tradisi setiap etnis yang mengajarkan sikap toleransi, gotong royong dan saling menghormati antar sesama. Tradisi kearifan lokal setiap etnis inilah yang menjadi modal bagi setiap etnis yang berbeda agama untuk saling menghargai satu sama lain untuk agama Hindu diperasatukan melalui organisasi **Para Sade** selalu berpesan terhadap toleransi beragama. Apalagi para tokoh-tokoh adat, tokoh agama dianggap sebagai alat pemersatu dalam setiap interaksi sosial sesama etnis di desa Tri Rukun. Dengan kesadaran dari kearifan lokal membuat warga masyarakat di desa Tri Rukun dan sekitar warga transmigrasi di Kabupaten Boalemo masih tetap dalam kondisi harmonis. (wawancara 4 Januari 2024)”.

Demikian halnya pernyataan informan penelitian Abdul Holid dan Abdulah juga mengatakan bahwa :

“Etnis Lokal Gorontalo sangat ramah kepada warga transmigrasi sampai dengan saat ini, dikatakan agak mudah menjalin hubungan harmonis dengan etnis Gorontalo karena sekeyakinan agama, sehingga

terjalin hubungan harmonis hingga saat ini, apalagi tradisi enis lokal Gorontalo dengan kearifan lokalnya diacara-acara ritual keagamaan seperti diacara kematian, dan setelah kematian ada adat hari ke 3, ke 7, ke 20, ke 40 dan ke 100 hari, disaat itu terjadi proses pembauran antar kelompok etnis lokal dengan kelompok etnis Jawa. Dan juga diacara hajatan untuk orang Gorontalo selalu mengundang tetangga terdekat. Dengan kearifan lokal Gorontalo, kami dari warga transmigrasi dari Jawa bisa merasa satu keluarga besar dengan etnis lokal Gorontalo (Wawancara 28 Januari 2024)”.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa penataan etnis melalui upaya sosialisasi dari FKUB terhadap tradisi multikulturalisme dinilai berhasil, dan kondisi ini juga ditunjang oleh kearifan lokal masing-masing etnis memiliki kesamaan sekalipun pengucapannya berbeda-beda setiap etnis.

Institusi Pendidikan Formal melalui Pendidikan multikultural di sekolah.

Salah satu yang sangat berpengaruh didalam menjaga tradisi multikulturalisme di masyarakat Kabupaten Boalemo disumbang oleh institusi pendidikan formal. Dengan adanya pendidikan formal generasi muda dari semua etnis memasuki jenjang sekolah dasar dan digembleng melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama, pendidikan sejarah dan pendidikan bahasa Indonesia mendapatkan materi-materi bagaimana menyatukan warga negara yang berbeda agama, suku, ras dan ideologi politik untuk saling menghargai sehingga tercipta integrasi nasional.

Intervensi pendidikan formal yang dilakukan pemerintah daerah dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan, menjadi faktor penentu didalam melembagakan tradisi multikulturalisme di daerah kabupaten Boalemo, sehingga tradisi kearifan lokal yang dibawah para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dianggap sepuh dapat dipelajari melalui pendidikan formal. (Amirin, 2013): Dengan kata lain, jika pendekatan pendidikan multikultural akan diimplementasikan di Indonesia, haruslah berdasarkan realita Indonesia dan kearifan lokal (*local wisdom atau indigenous knowledge*) dalam makna luas, tegasnya dengan memperhatikan karakteristik bangsa dan budaya Indonesia sendiri.

Pendidikan multikultural itu dapat dilihat atau diposisikan sebagai berikut :

Sebagai falsafah pendidikan; yaitu pandangan bahwa kekayaan keberagaman budaya Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar di Indonesia guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (berbarkat) dan bahagia dunia akhirat.

Sebagai pendekatan pendidikan; yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang kontekstual, yang memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Meminjam “teori” Zamroni (2011a:149-gambar), kedudukan nilai budaya dalam struktur statis pendidikan (bawaan siswa, bawaan guru, kurikulum, dan pedagogi atau “*the art of teaching*”).

Bidang kajian dan bidang studi; yaitu disiplin ilmu yang dibantu oleh sosiologi dan antropologi pendidikan menelaah dan mengkaji aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai-nilai budaya dan perwujudannya (norma, etiket atau tatakrama, adat-istiadat atau tradisi dan lain-lain mencakup “manifestasi budaya” agama) untuk/dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan.

Fakta literatur

Pendapat lain tentang multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa perbedaan budaya yang berbeda dapat eksis dilingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain (Zahrawati B 2018). Dengan kata lain multikulturalisme menerima dan menghargai keberagaman budaya (Mahfud 2006)(Nugraha, 2020). Sedangkan menurut Suryadinata (2002) multikulturalisme, bukanlah sebuah doktrin politik pragmatis, tetapi multikulturalisme merupakan cara pandang manusia dalam kehidupan. Dengan demikian multicultural bisa diartikan sama dengan kebhinekaan (Fadli et al., 2022) .Pandangan Fleras (2022 : 12-20) mengemukakan tipologi multikulturalisme yang memberikan ruang pada publik untuk mengidentifikasi level perbedaan makna yang terkait dengan wacana tersebut. Ia mengidentifikasi pemaknaan terhadap multikulturalisme sebagai a.Multikulturalisme sebagai fakta empiris (*empirical reality*) yang menggambarkan keberagaman dunia sebagai tempat tinggal. b.Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi atau filosofi yang meyakini kewajiban untuk menghormati perbedaan budaya (*cultural differences*) dan menawarkan kesetaraan sosial (*social equality*).c.multikulturalisme sebagai kebijakan (*policy*) dan program resmi yang membentuk mozaik identitas dan etnisitas. (Ubadah, 2022).

Membangun masyarakat multikulturalisme Indonesia berarti membangun suatu ideologi yang menempatkan kesetaraan dalam perbedaan pada posisi sentral. Mengikuti Bikhu Parekh (2001) istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen, yakni, pertama, konsep ini terkait dengan kebudayaan; kedua, konsep ini merujuk kepada pluralitas kebudayaan; dan ketiga, konsep ini mengandung cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Oleh sebab itu multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang atau semacam ideologi dalam kehidupan manusia. (Achmad Fedyani Syaifuddin, 2015). Menurut

Gorski, ada tiga tujuan utama pendidikan multikultural (yang boleh disebut sebagai sasaran instrumental dan terminal), yaitu: (1) meniadakan diskriminasi pendidikan, memberi peluang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya (tujuan instrumental) ;(2) menjadikan anak bisa mencapai prestasi akademik sesuai potensinya (tujuan terminal internal);(3) menjadikan anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global (tujuan terminal akhir eksternal).

Dampak penataan terhadap ketahanan wilayah.

Penataan kebijakan terhadap etnis tradisi multikulturalisme dalam membangun keharmonisan melalui perspektif kebijakan ketahanan nasional di daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dipertahankan demi mendorong kemajuan daerah seperti kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa warga transmigrasi berkontribusi pada peningkatan Pendapatan daerah disektor pertanian meningkatkan ketahanan pangan dan yang terpenting dari hasil usaha dari kelompok etnis transmigrasi secara tidak langsung juga menyumbang dari sektor pajak. sebagaimana bapak Neng Akerta sebagai sekretaris camat kecamatan Wonosari memberikan keterangan di bawah ini.

“Gambaran secara umum warga transmigrasi memasuki wilayah kecamatan Wonosari pada awal tahun 1980 ditempatkan di desa Harapan sebagai transmigrasi angkatan pertama, kemudian ditempatkan di desa Bongo 2 terdiri tiga dusun yaitu dusun Raharja, dusun Tri Rukun, Dusun Makmur yang saat ini dusun tersebut telah berubah statusnya menjadi desa. Selanjutnya ditempatkan di desa Bongo 3 yang terdiri dari dusun Suka Mulyo, dusun Dumito sekarang status dusun tersebut juga telah menjadi desa mandiri dan penempatan selanjutnya di desa persiapan SP1 dan SP2. Sebagian besar mata pencaharian warga transmigrasi sebagai petani. Di awal masuk warga transmigrasi hanya menanam hortikultura seperti kedelai, setelah itu, berkembang dengan persawahan diawali dengan sawah tadah hujan. Dan saat tahun 2000 didirikan Bendungan raksasa di Kecamatan Wonosari, membuat warga transmigrasi untuk mengolah pertanian sudah semakin baik, sehingga produksi pangan mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. (wawancara tanggal 22 Januari 2024).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas menunjukkan keberadaan warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat ke wilayah Kabupaten Boalemo dengan kehidupan awal mereka mengembangkan usaha pertanian dan hingga saat ini warga transmigrasi telah berhasil membawa wilayah Kecamatan Wonosari sebagai wilayah yang meraih prestasi dalam Swasembada Pangan.

KESIMPULAN

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan dibuat secara deskriptif, dan harus konsisten dan sesuai dengan pembahasan.

Temuan terpenting penataan etnis dilokasi transmigrasi melalui pelebagaan tradisi multikulturalisme melalui kebijakan makro dilaksanakan secara rutin menghasilkan hubungan sangat tangguh dari dimensi ketahanan wilayah. disebabkan kerjasama aparat pemerintah daerah kabupaten Boalemo sampai tingkat pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa sangat terorganisir sesuai dengan formulasi kebijakan yang direncanakan, Demikian juga bentuk-bentuk kelembagaan penataan etnis seperti peran lembaga pendidikan formal dan kearifan lokal dilaksanakan secara terencana. Dengan kerja sesuai formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dalam penataan etnis hasil evaluasi penataan etnis pada lokasi transmigrasi dinilai sangat tangguh dalam mewujudkan integrasi nasional dilokasi transmigrasi.

Kekuatan Tulisan (Kontribusi) Penataan tradisi multikulturalisme melalui kebijakan makro pelebagaan tradisi multikulturalisme telah mengungkap sesuatu yang tersembunyi pola penataan tradisi multikulturalisme selama ini tidak pernah diketahui publik. karena berdasarkan hasil penelitian terungkap ada kekuatan baru model penataan etnis tradisi multikulturalisme dilokasi transmigrasi, dimana kelompok etnis lokal Gorontalo memiliki kesamaan dalam mewujudkan kearifan lokal, sementara tradisi multikulturalisme bagi bangsa Indonesia memiliki kesamaan dalam dasar filsafat negara wujud dari nilai-nilai kearifan lokal, menyatu dengan kehidupan etnis lokal Gorontalo. hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan penataan terhadap kehidupan antar etnis di lokasi transmigrasi dibandingkan dengan beberapa wilayah penempatan transmigrasi di daerah lain mengalami konflik sosial. Sementara penempatan di kabupaten Boalemo telah berusia 42 tahun lamanya masih sangat tangguh.

Keterbatasan tulisan (yang belum sempat dikerjakan) adalah mengungkap mengapa pemerintah daerah belum memformulasikan peraturan daerah tentang tradisi multikulturalisme, dengan hadirnya Peraturan Daerah tentang tradisi multikulturalisme akan melengkapi kebijakan mikro dalam mengambil peran utama menjaga stabilitas daerah yang menjadi tujuan penempatan transmigrasi yang telah banyak berkontribusi bagi pembangunan daerah kabupaten Boalemo, PERDA tersebut akan memberi dampak bagi ketenangan warga transmigrasi di kabupaten Boalemo hidup bersama dengan etnis Gorontalo.

REFERENSI

- Achmad Fedyani Syaifuddin. (2015). Membumikan Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*.
- Ahmed, M. (2019). The Good, the Bad, and the Ugly: Implications of Ethnic Diversity in the Workplace. *Aisthesis*.
- Amirin, T. M. (2013). implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1047>
- Arneaud, M. J., Alea, N., & Waters, T. E. A. (2022). Flourishing Privately but Languishing Publicly: Ethnic Identity's Contribution to Understanding Eudaimonic Wellbeing. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114156>
- Batty, L., & Reilly, K. (2023). Understanding barriers to participation within undergraduate STEM laboratories: towards development of an inclusive curriculum. *Journal of Biological Education*. <https://doi.org/10.1080/00219266.2021.2012227>
- Collier, P. (2001). Implications of ethnic diversity. *Economic Policy*. <https://doi.org/10.1111/1468-0327.00072>
- Cservenka, A., Yardley, M. M., & Ray, L. A. (2017). Review: Pharmacogenetics of alcoholism treatment: Implications of ethnic diversity. In *American Journal on Addictions*. <https://doi.org/10.1111/ajad.12463>
- Fadli, R. V., Malang, U. N., & Sanankulon, K. (2022). Nilai-Nilai Multikulturalisme Tradisi Kupatan di Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. 4(1), 12–20.
- Ferguson, G. (2020). The Palgrave handbook of minority languages and communities. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. <https://doi.org/10.1080/01434632.2019.1632511>
- Hearle, K. (2022). Salinas: A History of Race and Resilience in an Agricultural City. *Steinbeck Review*. <https://doi.org/10.5325/steinbeckreview.19.2.0230>
- Inder, K. J., Lewin, T. J., & Kelly, B. J. (2012). Factors impacting on the well-being of older residents in rural communities. In *Perspectives in Public Health*. <https://doi.org/10.1177/1757913912447018>
- Kolo, P. (2015). New Approaches to the Dynamics, Measurement and Economic Implications of Ethnic Diversity. In *New Approaches to the Dynamics, Measurement and Economic Implications of Ethnic Diversity*. <https://doi.org/10.3726/978-3-653-02395-4>
- Krasnyakov, N. I. (2022). Integration of Central Asian Territories in the System of National and Regional Administration of the Russian Empire (19th Century). *Vestnik Novosibirskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriya: Istoriya, Filologiya*. <https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-1-63-74>
- Murtisari, A., Irham, I., Mulyo, J. H., & Waluyati, L. R. (2022). The Effects of the Transmigration Programme on Poverty Reduction in Indonesia's Gorontalo Province: A Multidimensional Approach. *Economies*. <https://doi.org/10.3390/economies10110267>
- Nugraha, D. (2020). URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI NDONESIA. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 140. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809>
- Pratiwi, A., Matous, P., & Martinus, K. (2022). Transmigration programs and migrant positions in rural community knowledge networks. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.09.019>
- Santoso, T. R., Rahayu, R., & Setiana, A. R. S. (2023). Political interest of religious ritual: The Sundanese Nyangku ritual in Indonesia. *IAS Journal of Localities*. <https://doi.org/10.62033/iasjol.v1i2.16>
- Shukla, S. (2020). COVID-19 and Globalization, An Analysis. *An International Multidisciplinary Double-Blind Peer-Reviewed Research Journal*.

- Ubadah. (2022). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Konsep, Pendekatan, dan Penerapannya dalam Pembelajaran)*.
- Wahid, A., Sunardi, S., & Kurniawati, D. A. (2019). MEMBUMIKAN KONSTITUSI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENJAGA HAK KEBHINEKAAN. *Yurispruden*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2787>
- Warganegara, A., & Waley, P. (2022). The political legacies of transmigration and the dynamics of ethnic politics: a case study from Lampung, Indonesia. *Asian Ethnicity*. <https://doi.org/10.1080/14631369.2021.1889356>